



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG**



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR **37** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dan rencana kerja perangkat daerah lainnya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. lokasi; dan
 - d. kelompok sasaran,yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALIKOTA MAGELANG,

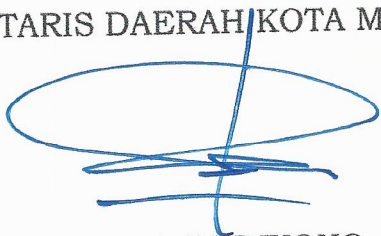


MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	16.845.047.782,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	13.588.888.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	6.883.397.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	28.051.629.500,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	6.732.631.000,00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	10.032.127.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	32.612.271.000,00
19	Sekretariat DPRD Kota Magelang	30.784.953.000,00
20	Sekretariat Daerah	42.179.996.000,00
21	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	21.762.462.000,00
22	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	23.973.153.000,00
23	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	18.895.492.000,00
24	Inspektorat Kota Magelang	8.228.302.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Magelang	11.103.595.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	30.877.012.000,00
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	24.635.591.000,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.969.061.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
	TOTAL	951.912.043.057,00

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ





PERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

Jl. P. Diponegoro No. 61 Telp. (0293) 364873 Fax. (0293) 364708 Magelang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG
NOMOR 050.4 / 07 / 450 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 telah disahkan oleh Walikota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022.
- KETIGA : Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat ini.
- KETIGA : Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 disusun sebagai berikut:
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
 - BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal September 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG,


HAMZAH KHOLIFI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 050.23/ 37 / 112 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022	iv
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG NOMOR 050.4/ 07/ 450 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2022	x
BAB I PENDAHULUAN	BAB I - 1
A. Latar Belakang	BAB I - 1
B. Landasan Hukum	BAB I - 7
C. Maksud dan Tujuan	BAB I - 8
D. Sistematika Penulisan	BAB I - 8
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN KOTA MAGELANG TAHUN 2020	BAB II - 1
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	BAB II - 1
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	BAB II - 24
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	BAB II - 28
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..	BAB II - 37
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	BAB II - 56

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	BAB III - 1
A.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	BAB III - 1
B.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	BAB III - 5
C.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	BAB III - 7
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	BAB IV - 1
BAB V	PENUTUP	BAB V - 1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG
NOMOR 050.4/ /450 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam manajemen pembangunan daerah, perencanaan merupakan salah satu tahapan/fase yang pertama kali harus dijalankan sebelum masuk dalam tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan porsi dan kontribusi yang saling berkaitan satu sama lain. Namun demikian salah satu kunci awal keberhasilan pencapaian tujuan, baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Untuk mendukung tercapainya perencanaan yang berkualitas maka dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tidak bisa lepas dari perencanaan pembangunan nasional. Sebab perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut selain mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 disusun pada masa transisi tahap Ke-3 RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 dengan tahap Ke-4 Tahun 2021-2025, sehingga tema tahun perencanaan adalah Akomodatif dan Transitif. Renja tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahap ke-4, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Visi Misi Walikota terpilih, serta RT/RW Kota Magelang Tahun 2011-

2031. Renja 2022 juga mengacu kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, serta mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menentukan rencana program dan kegiatannya.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka didahului dengan perencanaan pembangunan daerah yang menghasilkan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Menurut periodisasinya, Rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu RPJPD, rencana jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu RPJMD, dan rencana kerja tahunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu RKPD. Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan rencana kerja (renja) perangkat daerah.

Dalam perjalanan Penyusunan Renja Tahun 2022, Indonesia mengalami bencana non alam yaitu pandemi virus corona. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi Jawa Tengah, fokus pembangunan Kota Magelang tahun 2022 akan mengalami pergeseran dari skenario yang sudah direncanakan dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021. Secara nasional tahun 2022 diprediksi masih akan diprioritaskan pada pemulihan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi covid-19. Selain dalam tataran kebijakan, secara teknis penyusunan Renja juga mengalami penyesuaian karena beberapa tahap yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara konvensional tatap muka, sekarang dilakukan secara online.

Tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun tahun 2021 yang merupakan masa transisi periode tahun ke 3 RPJP Kota Magelang (Tahun 2016-2021) dengan tahap ke 4 (Tahun 2021-2026). Renja PD Tahun 2022 disusun secara paralel dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026, dengan kata lain Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun pada tahun 2021 dan dilaksanakan pada tahun 2022. Disamping itu penyusunan renja juga bukan kegiatan yang berdiri sendiri,

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, KUA PPAS serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Oleh karena itu sebagai acuan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

- Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2022 dengan tema Akomodatif dan transitif;

Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan mengakomodir berbagai dokumen perencanaan yaitu RPJP tahap ke IV, RPJMD Provinsi Jawa Tengah termasuk dokumen sektoral dalam masa transisi peralihan RPJMD periode III (Tahun 2016-2021) ke periode IV (2021-2026) RPJP Kota Magelang tahun 2005-2025.

Tema ini untuk memantapkan pembangunan secara menyerulur untuk mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi berlandaskan budaya yang unggul, SDM berkualitas dan mandiri serta mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani.

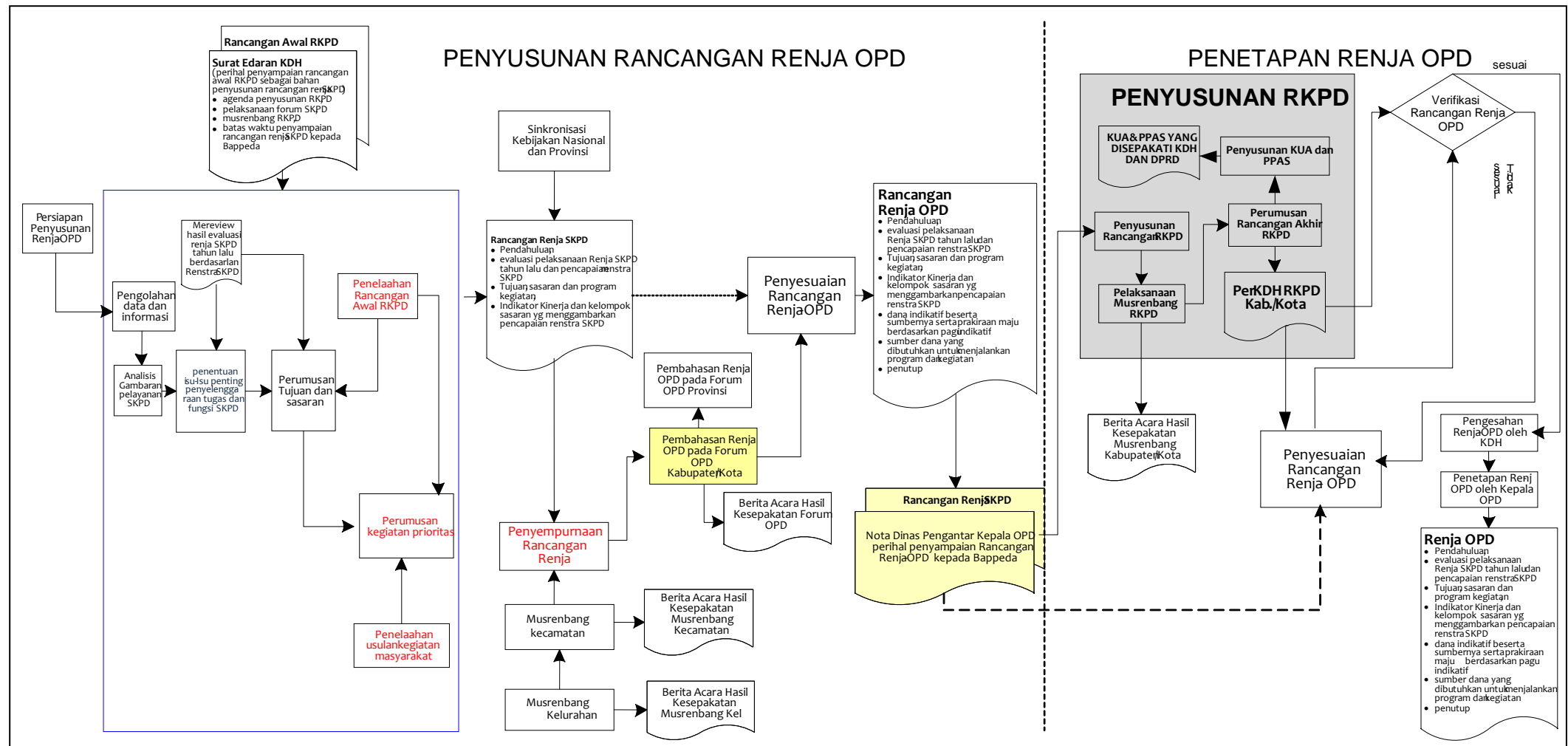
- Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2022 sebagai acuan untuk perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2022;
- Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dapat menjawab berbagai isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- Mengakomodir usulan masyarakat dalam musrenbang kecamatan, terutama usulan yang selaras dengan program prioritas dalam RKPD Tahun 2022;
- Mengakomodir hasil-hasil **fokus group discussion** (FGD) terkait prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Tahun 2022.
- Mengakomodir hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2022.
- Substansi pada matriks rancangan Renja OPD Tahun 2022 memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun.

- Penyusunan program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada ketentuan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
- Memperhatikan Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- Memperhatikan alokasi pagu indikatif setiap OPD sebagaimana yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 dimulai dari penyusunan Rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2022, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022. Rancangan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah ada pengesahan dari Walikota. Proses perumusan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022



B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Surat Edaran Walikota Magelang Nomor 050/47/410 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang Surat Edaran Penyusunan Rancangan Renja OPD Tahun 2022.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.

2. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2022 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 050.23/...../112 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG NOMOR 050.4/...../450 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2020

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK TAHUN 2020

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2020 dihadapkan dengan target yang tercantum pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang untuk periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 tercantum 8 (delapan) program dan 37 (tigapuluh tujuh) kegiatan, sebagaimana yang tertera dalam Renja OPD. Dari 8 (delapan) program dan 37 (tigapuluh tujuh) kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua, dengan rata-rata capaian 100%.
2. Program dan Kegiatan yang terdapat di dalam Renstra namun tidak terdapat dalam Renja Perangkat Daerah dan DPA SKPD Tahun 2020 yaitu:
 - a. Kegiatan Pendataan dan Penataan dokumen/arsip daerah Program Prnyelamatan dan Pelestarian Arsip/arsip daerah karena penganggaran 2020 sudah disesuaikan dengan urusan masing-masing OPD.
 - b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
 - d. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
 - e. Penyediaan jasa surat menyurat
 - f. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
 - g. Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah karena menyesuaikan urusan siskamling menjadi urusan Satpol PP.

- h. Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
 - i. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
 - j. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah
 - k. Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 - l. Kegiatan Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat
 - m. Kegiatan Penyusunan Database Ormas Kemasyarakatan
 - n. Kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
 - o. Kegiatan Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dan mengantisipasi radikalisme
 - p. Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat
 - q. Kegiatan Koordinasi forum-forum diskusi politik
3. Secara umum faktor penyebab tidak sesuai kegiatan dengan Rentra disebabkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan adanya kenaikan indeks harga, juga menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi terkini pada Badan Kesbangpol Kota Magelang. Disamping itu juga penyesuaian bidang/urusan OPD. Walaupun demikian hal tersebut tidak mengurangi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Kota Magelang.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang tahun 2020 sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK S/D TAHUN 2020*)
KOTA MAGELANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran ketertiban administrasi kantor	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%
	Kegiatan:									
1.05.1.05.02.01 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangk o	1200 lembar	800 lembar	0 lembar	0 lembar	-	0 lembar	800 lembar	66.67%
1.05.1.05.02.01 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening jasa komunikasi, air dan listrik	4 jenis, 12 bulan	4 jenis, 12 bulan	4 jenis, 12 bulan	4 jenis, 12 bulan	100.00%	4 jenis, 12 bulan	4 jenis, 12 bulan	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.1.05.02.01 .06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Pembayaran perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	16 kendaraan	14 kendaraan	14 kendaraan	14 kendaraan	100.00%	14 kendaraan	14 kendaraan	87.50%
1.05.1.05.02.01 .07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium Penatausaha Keuangan dan Barang	10 orang & 12 bulan	10 orang & 12 bulan	10 orang & 12 bulan	10 orang & 12 bulan	100.00%	12 bulan	10 orang & 12 bulan	100.00%
1.05.1.05.02.01 .08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	222 item & 2 orang	101 item & 2 orang	11 item & 2 orang	11 item & 2 orang	100.00%	33 item & 2 orang	144 item & 2 orang	64.84%
1.05.1.05.02.01 .10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	276 item	148 item	16 item	16 item	100.00%	47 item	195 item	70.29%
1.05.1.05.02.01 .11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	48 jenis & 240.000 lembar	21 jenis & 129.999lembar	6 jenis & 6.215 lembar	6 jenis & 6.215 lembar	100.00%	6 jenis & 22488 lembar	33 jenis & 202.838 lembar	84.52%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.1.05.02.01 .12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/komponen listrik	78 item	37 item	0	0	-	11 item	61 item	78.21%
1.05.1.05.02.01 .15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100.00%	3 jenis	3 jenis	100.00%
1.05.1.05.02.01 .16	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan logistik kantor	36 tabung	18 tabung	4 tabung	4 tabung	100.00%	6 tabung	28 tabung	77.77%
1.05.1.05.02.01 .17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makan dan minum rapat	251 keg & 12 bulan	135 keg & 12 bulan	7 keg & 4 bulan	7 keg & 4 bulan	100.00%	44 keg & 12 bulan	186 keg & 12 bulan	74,10%
1.05.1.05.02.01 .18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	351 kegiatan	159 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	100.00%	45 kegiatan	213 kegiatan	60.68%
1.05.1.05.02.01 .19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa penjaga malam dan <i>front office</i> serta pengemudi	6 orang 12 bulan	5 orang 12 bulan	5 orang 12 bulan	5 orang 12 bulan	100.00%	5 orang 12 bulan	5 orang 12 bulan	83.33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana Kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%
	Kegiatan:									
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	5 unit	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
1.05.1.05.02.02 .07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	11 jenis	7 jenis	0	0	0.00%	0	11 jenis	100.00%
1.05.1.05.02.02 .09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	3 jenis	3 jenis	0	0	0.00%	0	3 jenis	100.00%
1.05.1.05.02.02 .10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	6 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	4 paket	66.67%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.1.05.02.02 .20	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	16 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100.00%	14 unit	14 unit	87.50%
1.05.1.05.02.02 .22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	54 jenis	25 jenis	3 jenis	3 jenis	100.00%	7 jenis	35 jenis	64,81%
1.05.1.05.02.02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	36 jenis	17 jenis	0	0	0	4 jenis	23 jenis	63.89%
1.05.1.05.02.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 jenis	2 jenis	0	0	0	1 jenis	3 jenis	75.00%
1.05.1.05.02.02 .27	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Pemeliharaan mebelair kantor	3 jenis	3 jenis	0	0	0.00%	0	3 jenis	100.00%
1.05.1.05.02.02 .36	Rehab sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor yang direhab (planter taman	4 paket	17.50 m2 (2 paket)	0	0	0.00%	0	2 paket	50.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		kantor)								
1.05.1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya perencanaan, pelaporan kinerja dan laporan keuangan OPD sesuai aturan.	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%
	Kegiatan:									
1.05.1.05.02.06 .01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku laporan capaian kinerja	10 buku & 24 lap (204)	30 buku & 72 lap	10 buku & 24 lap	10 buku & 24 lap	100.00%	10 buku & 24 lap	50 buku & 120 lap (170)	83.33%
1.05.1.05.02.06 .04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	18 buku	9 buku	3 buku	3 buku	100.00%	3 buku	15 buku	83.33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.1.05.02.06 .06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja	12 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	12 dokumen	100.00%
1.05.1.05.02.06 .08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA dan DPPA	180 buku	90 buku	30 buku	30 buku	100.00%	30 buku	180 buku	100.00%
1.05.1.05.02.06 .10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Renstra	2 dokumen	2 dokumen	0	0	0.00%	0	2 dokumen	100.00%
1.05.1.05.02.06 .27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)	LKj IP SKPD	34 buku	14 buku	4 buku	4 buku	100.00%	6 buku	24 buku	70.59%
1.05.1.05.02.06 .29	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Dokumen Perubahan Renstra OPD	0	1 dokumen	0	0	0.00%	1 dokumen	1 dokumen	100.00%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya perencanaan SKPD	0%	100%	0	0	0.00%	0	100%	0%
	Kegiatan:									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Dokumen Renstra	0	1 dokumen	0	0	0.00%	0	1 dokumen	100.00%
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja	0	2 dokumen	0	0	0.00%	0	2 dokumen	100.00%
2.18.1.05.02.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah	Tertatanya arsip sesuai aturan yang berlaku	100%	0%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%
	Kegiatan:									
2.18.1.05.02.16 .02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penataan penyelamatan arsip SKPD	10000 arsip aktif dan 50 dos inaktif	2000 arsip aktif dan 10 dos inaktif	0	0	0	2000 arsip aktif dan 10 dos inaktif	6000 arsip aktif dan 30 dos inaktif	60.00%
2.10.1.05.02.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media	Prosentase publikasi kegiatan OPD	0	0	0	0	0.00%	100%	100%	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Massa									
	Kegiatan:									
2.10.1.05.02.15 .19	Pengelolaan Website	Data informasi OPD	0	0	0	0	0	0	48 item	100.00%
	Program Pengembangan Data/Informasi/Stati stik Daerah	Database ormas yang akurat	0%	100%	0	0	0.00%	0	100%	100%
	Kegiatan:									
	Penyusunan Data Base Organisasi Masyarakat	Data Profil Ormas dan Verifikasi Ormas	0	60 buku dan 12 bulan	0	0	0.00%	0	60 buku dan 12 bulan	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.105.02.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	75.16%	80.00%	72,65%	90,81%	80.00%	72,65%	90,81%
		Terbentuknya Kampung Bebas Narkoba	6	4	5	4	100.00%	6	5	83.33%
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai- nilai Pancasila	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2.57%	4.26%	2,15%	4.49%	208.84%	2,57%	4.49%	174.71%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Kegiatan:	Prosentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15%	9.71%	12,15%	9.71%	79.92%	12.15	9.71%	79.92%
1.05.1.05.02.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah dan buku laporan intelijen	72 kali dan 72 buku	36 buku	12 buku	12 buku	100.00%	12 buku	60buku	83,33%
1.05.1.05.02.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Lomba siskamling tingkat Kota Magelang/Peserta penyuluhan sistem keamanan lingkungan	17 Kelurahan (6 kali)	17 kelurahan (3 kali)	0	0	0	3 Kecamatan (1 kali) / 150 orang	17 kelurahan (3 kali) / 200 orang	50.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.1.05.02.16 .06	Koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	180 buku	120 buku	30 buku	30 buku	100.00%	30 buku	180 buku	100%
1.05.1.05.02.16 .07	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	Buku laporan eks G 30.S/PKI, rekomendasi kegiatan dan ijin survey	38 buku	26 buku	4 buku	4 buku	100.00%	8 buku	38 buku	100%
1.05.1.05.02.16 .08	Pemantauan/Pengaw asan orang asing dan tenaga kerja asing	Rakor pengawasan orang asing dan sosialisasi kepada masyarakat	72 kali dan 120 buku	12 kali dan 24 buku	0	0	0	12 kali dan 200 Orang	36 kali dan 72 buku, 200 Orang	50.00%
1.05.1.05.02.16 .09	Pengendalian Keamanan lingkungan	jumlah laporan pemantauan wilayah	2190 lap	1095 lap	90 lap	90 lap	100.00%	365 lap	1460 lap	66.67%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.1.05.02.16.10	Operasi Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Jumlah operasi P4GN	784 kali	24 kali	0	0	0	12 kali	48 kali	66.67%
1.05.1.05.02.16.11	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta penyuluhan P4GN dan jumlah peserta test urine	2700 orang dan 600 orang	3850 orang dan 800 orang	300 orang	300 orang	100.00%	1700 orang	5550 orang dan 300 orang	205.56%
1.05.1.05.02.16.12	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Jumlah Peserta penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS dan jumlah peserta test urine	750 orang	500 orang	0	0	0	300 orang dan 100 orang	800 orang dan 100 orang	106.67%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.1.05.02.16 .13	Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba	Terlaksananya test urine untuk deteksi narkoba	2500 orang	500 orang	0	0	0	0	1000 orang	40.00%
1.05.1.05.02.16 .14	Pembentukan kampung bebas narkoba	Jumlah kampung bebas narkoba yang dibentuk	6	4	5	4	80%	6	5	83,33%
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)/ Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah rakor dan buku laporan FKDM Kota Magelang	0	4 kegiatan dan 12 buku	0	0	0.00%	0	4 kegiatan dan 12 buku	100.00%
1.05.1.05.02.16 .15	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Raperda tentang fasilitasi pence- gahan penyalahgunaan narkoba	0	0	0	0	0.00%	1 raperda	1 raperda	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.1.05.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	80%	76.67%	77,40%	92.90	120.03%	80%	92.90	116.13%
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	57.39%	36.36%	49,90%	45.93%	92.04%	57,39%	45.93%	80%
		Database ormas yang akurat	77%	72.73%	75%	80.49%	107.32%	77%	80.49%	104.53%
	Kegiatan:									
1.05.1.05.02.17 .01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Peserta Dialog Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama	1380 orang	390 orang	0	0	100.00%	200 orang	590 orang	42.75%%
1.05.1.05.02.17 .02	Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial di Kalangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Tentang	1400 orang	400 orang	50 orang	50 orang	100.00%	50 orang	500 orang	35.71%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Masyarakat	Pembauran/Plural isme								
1.05.1.05.02.17 .05	Pengembangan Nilai- Nilai Pancasila Bagi Warga Masyarakat	Jumlah Peserta Dialog Interaktif Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila & karakter bangsa serta Peringatan Hari Lahir Pancasila	700 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100.00%	100 orang	500 orang	71,43%
1.05.1.05.02.17 .03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta dialog tentang wasbang	900 orang	360 orang	0	0	100.00%	0	360 orang	40%
1.05.1.05.02.17 .06	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terseleenggaranya peringatan hari bela negara	0	1 kegiatan	0	0	0	0	1 kegiatan	100.00%
	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring	48 laporan	8 buku	0	0	0.00%	0	8 buku	16.67%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Kegiatan dan Keberadaan Ormas									
1.05.1.05.02.17 .08	Penyusunan Data Base Organisasi Masyarakat	Data Profil Ormas dan Verifikasi Ormas	300 buku	90 buku 12 bulan	0	0	0	0	90 buku 12 bulan	30%
1.05.1.05.02.17 .09	Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah peserta sosialisasi GNRM	0	1 kegiatan, 80 orang	0	0	0.00%	0	1 kegiatan, 80 orang	100.00%
1.05.1.05.02.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	10 kali	8	10	10	100.00%	10	10	100.00%
		Terpublikasinya dialog antar agama	12 kali	6	9	6	66,67%	12	6	50%
		Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	4 kali	1	4	2	50%	4	2	50%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%
		Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor	3 kali	3	3	3	100.00%	3	3	100.00%
	Kegiatan:									
1.05.1.05.02.18 .01	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Uoaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Kerukunan Kehidupan Beragama di Masyarakat	1200 orang	620 orang	0	0	100.00%	50 orang	720 orang	60%
1.05.1.05.02.18 .02	Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Diskusi Wawasan Kebangsaan	600 orang	500 orang	0	0	0	0	500 orang	83.33%
1.05.1.05.02.18 .07	Forum Kerukunan Antar Umat	Jumlah Rakor FKUB	22 kali	8 kegiatan dan 20 laporan	4 kali	4 kali	100.00%	4 kali	16 kali dan 20 laporan	72.72%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Beragama (FKUB) Kota Magelang									
1.05.1.05.02.18 .08	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia	Jumlah Rakor FPBI	22 kali	8 kegiatan dan 20 laporan	4 kali	4 kali	100.00%	4 kali	16 kali dan 20 laporan	72.72%
1.05.1.05.02.18 .10	Dialog antar Tokoh Agama dalam mengantisipasi Radikalisme	Jumlah peserta dialog	900 orang	200 orang	0	0	0	0	200 orang	22.22%
1.05.1.05.02.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	100.00	18.75	37.50	100.00	266.67%	56.25	100.00	100.00%
		Persentase ormas yang difasilitasi	9.84	7.82	8.27	9.50	114.87%	8.66	9.50	96.54%
	Kegiatan:									
1.05.1.05.02.19 .02	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM Dalam Partisipasi Mendukung	Jumlah Pengiriman Anggota Ormas/LSM	480 orang	160 orang	0	0	0	5 orang	165 orang	34,38%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Terciptanya Stabilitas Daerah									
1.05.1.05.02.19 .03	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah rakor dan buku laporan FKDM Kota Magelang (fasilitasi kegiatan FKDM Tingkat Kota)	24 kali dan 72 buku	12 kali dan 36 buku	4 kali dan 12 buku	4 kali dan 12 buku	100.00%	4 kali	20 kali dan 48 buku (12 kali)	83,33%
		Tingkat partisipasi politik	NA (79)	76.10	76	77,41%	101,86	77,41%	79	97,98%
	Kegiatan:									
1.05.1.05.02.21 .01	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Peserta Dialog Interaktif Masyarakat dengan Forpimda	1080 orang	540 orang	0	0	0	180 orang	720 orang	66.67%
1.05.1.05.02.21 .03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Peserta Forum Diskusi Politik	216 orang	101 orang	0	0	0	36 orang	137 orang	63.43%
1.05.1.05.02.21 .04	Penyusunan Data Base Partai Politik	Data Profil Partai Politik	100 buku	60 buku	0	0	0	0	60 buku	60.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/n-1 (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n- 1)	
					Target Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05.1.05.02.21 .06	Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Berita Acara Kelengkapan Persyaratan Bantuan Keuangan Parpol	54 parpol	27 parpol	9 parpol	9 parpol	100.00%	9 parpol	36 parpol	66.67%
1.05.1.05.02.21 .07	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Peserta Sosialisasi Pemilu dan Pam Posko DESK Pemilu (Laporan perkembangan politik daerah)	600 orang	200 orang dan 2 kali	1 keg	1 keg	100.00%	0	400 orang dan 2 kali (10 laporan)	66.67%

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Renja tahun 2022 merupakan perencanaan tahun 2021 untuk dilaksanakan tahun 2022.. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi permasalahan.

Pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang pada tahun 2020 secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021, yang berarti target dalam Renstra hampir semua tercapai atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi beban tahun yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 2.1 yang berisi Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .

Adapun pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang pada tahun 2020 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kota Magelang

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
1	Angka kriminalitas	-	v	12.64	12.14	11.64	11.64	13.31	12,54	12.14	10	11,14	
2	Angka kriminalitas yang tertangani	-	v	12.00	12.00	12.50	12.50	9.70	9,43	12.00	7,73	12,5	
3	Prosentase penurunan kasus narkoba	-	v	3%	3%	3%	3%	0	0%	3%	28,50%	3%	
4	Tingkat kerukunan hidup antar suku, adat, ras dan agama	-	v	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase kriminalitas yang tertangani	-	-	80	80	80	80	72.84	75,16	75,35	73,88	80	
6	Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham - paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	-	-	6	9	12	12	2.44	6,47	9,71	9,71	12,15	

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
8	Jumlah kampung bebas narkoba	-	-	3	4	5	5	2	3	4	4	5	
9	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	-	-	1.47	1.81	2.15	2.15	1.40	2,87	4,26	4,49	2,57	
10	Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	-	-	37.50	56.25	75.00	75.00	18.75	100	100	100%	100	
11	Persentase ormas yang difasilitasi	-	-	8.27	8.66	9.45	9.45	7.82	9,5	8,16	0,00%	9,84	
12	Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	-	-	72.20	74.80	77.40	77.40	72.73	76,67	78,61	77,40%	80	
13	Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	-	-	35.19	42.59	49.90	49.90	7.41	36,36	42.59	45,93%	57,39	
14	Database ormas yang akurat	-	-	71.00	73.00	75.00	75.00	69.55	72,73	80,41	75,00	77	
15	Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	-	-	10	10	10	10	8	10	10	8	10	

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
16	Terpublikasikannya dialog antar agama	-	-	6	8	9	9	6	6	8	4	12	
17	Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	-	-	2	4	4	4	1	2	2	4	4	
18	Tingkat kerukunan antar umat beragama	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yg terjalin	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
20	Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	-	-	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
21	Tingkat partisipasi politik	-	-	67	79	76	76	NA	76,1	86,90	77,41	-	

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya, dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu:

1. Keamanan, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan yang bersifat dinamis dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya antara lain semakin derasnya arus budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila sebagai akibat dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Budaya asing tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Disamping itu faktor yang turut mempengaruhi ketentraman dan ketertiban umum antara lain tingkat pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat yang beragam, kebebasan berpendapat yang berlebihan serta menipisnya nilai-nilai nasionalisme akan budaya gotong royong dan saling menghormati perbedaan. Hal – hal tersebut dapat memberikan dorongan pada terjadinya tindak kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Walaupun Kota Magelang merupakan kota kecil dan cenderung kondusif namun memperhatikan data dari Polres Magelang Kota tentang kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun 2011-2020 sangat *fluktuatif*, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3 Data Kriminalitas di Kota Magelang
Tahun 2011-2020**

Tahun	Jumlah Kasus Kriminalitas	Kasus yang terselesaikan	Angka Kriminalitas Tertangani
2011	242	164	13,76
2012	184	134	11,20
2013	132	90	7,50
2014	149	108	8,95
2015	171	134	11,08
2016	170	120	9,89
2017	162	118	9,70
2018	153	115	9,43
2019	142	107	8.21
2020	134	99	7.73

Sumber : Polres Magelang Kota

Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus kriminalitas dan jumlah kasus yang dapat diselesaikan/tertangani di Kota Magelang dalam beberapa tahun terakhir terlihat *fluktuatif*. Hal ini juga turut berpengaruh terhadap angka kriminalitas di Kota Magelang. Adapun angka kriminalitas diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk tahun bersangkutan}} \times 10.000$$

Data jumlah penduduk yang digunakan sebagai penghitungan berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk yang di *release* dari BPS.

Sedangkan apabila dilihat dari prosentase jumlah kasus kriminalitas yang dapat ditangani hingga selesai pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2020 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4 Data Kriminalitas yang Tertangani
Di Kota Magelang Tahun 2011-2020**

Tahun	Jumlah Kasus Kriminalitas	Kasus yang terselesaikan	% Kasus Selesai
2011	242	164	67,77
2012	184	134	72,83
2013	132	90	68,18
2014	149	108	72,48
2015	171	134	78,36
2016	170	120	70,59
2017	162	118	72,84
2018	153	115	75,16
2019	142	107	75,35
2020	134	99	73,88

Sumber : Polres Magelang Kota

Letak Kota Magelang yang berada di tengah-tengah jalur lalu lintas perekonomian, yaitu antara Semarang-Purwokerto dan Jogjakarta-Semarang merupakan posisi yang sangat strategis. Namun demikian ekses negatif yang dapat ditimbulkan adalah menjadi transit bahkan sasaran peredaran gelap narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras serta tindak kriminalitas lainnya.

Walaupun secara umum jumlah kasus kriminalitas bersifat fluktuatif dan tanpa mengesalkan perhatian terhadap jenis kasus kriminalitas yang lain, maraknya peredaran minuman keras serta penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan kasus penyalahgunaan narkoba dan miras tersebut dapat menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, karena dampak negatifnya dapat merusak generasi bahkan bisa terjadi *lost generation*. Disamping itu kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran minuman keras menjadi fenomena gunung es yang semakin

meresahkan di kalangan masyarakat. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), Kota Magelang sudah masuk kategori daerah merah yang merupakan indikasi daerah peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan data yang tercatat pada Polres Magelang Kota, kasus narkoba yang terjadi di wilayah Kota Magelang seperti ditampilkan pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Data Kasus Narkoba di Kota Magelang
Tahun 2011-2020**

Tahun	Jumlah Kasus Narkoba
2011	11
2012	6
2013	13
2014	23
2015	26
2016	21
2017	30
2018	33
2019	35
2020	25

Sumber : Polres Magelang Kota

Kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran minuman keras yang terjadi merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapatkan perhatian serius semua stakeholders, bukan hanya tanggung jawab penegak hukum (aparatus kepolisian) semata. Oleh karena itu, unsur institusi pemerintah, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga masyarakat luas harus bersinergi dalam melaksanakan upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Upaya preemtif, preventif, dan represif terus dilakukan guna mengatasi permasalahan besar ini. Beragam strategi dan kebijakan yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan telah dilakukan

untuk menekan angka laju kejadian melalui cara P4GN. Mulai dari kegiatan sosialisasi, penyuluhan, rehabilitasi hingga pengkaderan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Disamping tindak kriminalitas dan narkoba yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh komponen-komponen masyarakat, baik mahasiswa atau organisasi kemasyarakatan, cenderung fluktuatif dengan tren meningkat dari tahun ke tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ini juga merupakan wahana penyampaian aspirasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah (*feedback*). Berdasarkan data unjuk rasa atau demonstrasi yang mempunyai ijin dari pihak kepolisian dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Data Jumlah Unjuk Rasa di Kota Magelang Tahun 2011-2020

Tahun	Jumlah Unjuk Rasa yang Berijin
2011	5
2012	12
2013	18
2014	5
2015	13
2016	16
2017	10
2018	8
2019	13
2020	5

Sumber : Polres Magelang Kota

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan khalayak ramai atau massa harus mendapatkan ijin prinsip dari Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Magelang. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi

ijin keramaian umum setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota Magelang. Selain ijin keramaian umum, Badan Kesbangpol juga melayani pemberian ijin riset/survey kepada para peneliti, baik dari mahasiswa, organisasi kemasyarakatan atau warga masyarakat, yang akan melakukan riset di Kota Magelang.

Dalam hal kesatuan bangsa, masih lemahnya kontrol sosial dalam mengantisipasi gejala adanya penyakit masyarakat merupakan tantangan yang harus dihadapi. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih harus ditingkatkan agar sejalan dengan esensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekhawatiran isu SARA yang sering menjadi pemicu timbulnya konflik merupakan ancaman laten yang sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan.

Disamping itu, kecenderungan semakin melemahnya pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme, khususnya di kalangan generasi muda, dimungkinkan karena adanya arus informasi global yang tidak mungkin dapat dibendung seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informatika.

Perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat dengan pola yang tidak menentu menuntut ditingkatkannya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya sehingga kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi potensi ancaman meningkat serta dilaksanakannya pemantauan secara terus menerus/intensif agar kesiapan antisipasi terhadap kemungkinan gangguan keamanan dapat dibangun dengan baik

2. Politik Dalam Negeri

Semenjak era reformasi menggantikan orde baru, *euphoria* masyarakat terhadap keterbukaan dan demokratisasi proses politik semakin luas berkembang. Masyarakat seolah-olah baru saja terlepas dari belenggu keterkekangan. Persepsi yang keliru dari masyarakat bahwa reformasi adalah bebas berbuat

sesukanya menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan yang disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkadang tidak efektif dalam implementasinya karena bertentangan dengan kepentingan sebagian masyarakat.

Disamping itu, akibat kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi sehingga percaturan politik maupun permasalahan ditingkat nasional/pusat dan beberapa daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat langsung diikuti oleh masyarakat luas. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat memunculkan potensi negatif di daerah-daerah lain terutama yang berdekatan maupun jauh jaraknya. Oleh karena itu perlu dijalin komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan beberapa pihak terkait agar kondusivitas di daerah dapat terjaga dan tidak terpengaruh dengan kondisi di pusat maupun daerah lain.

Sementara itu dari sisi politik praktis, munculnya banyak partai yang diusung para politisi merupakan cerminan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang ada. Namun demikian peran dan fungsi lembaga-lembaga politik yang ada ternyata belum dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Jumlah partai politik peserta pemilu dan yang mempunyai wakil di DPRD Kota Magelang hasil dari pemilu legislatif 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.7 Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Magelang

Pemilu Tahun	Jumlah Partai Politik
1999	31
2004	21
2009	26
2014	12
2020	16

Sumber : KPU Kota Magelang

**Tabel 2.8 Jumlah Keterwakilan Partai Politik
di DPRD Kota Magelang**

Periode	Jumlah Partai Politik
1999-2004	7
2004-2009	9
2009-2014	9
2014-2020	9
2020-2024	8

Sumber : KPU Kota Magelang

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) sebagai wahana berdemokrasi seluruh lapisan masyarakat prosesnya belum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang dianggap merugikan banyak pihak. Di samping itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput) karena faktor ketidakterwakilan atau juga karena kesalahan administrasi dalam tahapan awal proses pemilu. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang, jumlah pemilih dan warga masyarakat yang mempergunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.9 berikut ini:

**Tabel 2.9 Jumlah Pemilih dan Jumlah Pemilih yang
Menggunakan Hak Suaranya di Kota Magelang
pada Pemilu Tahun 2008-2020**

Pemilihan Umum	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Suaranya	%
Pemilihan Gubernur 2008	93.260	63.940	68,56
Pemilihan Legislatif 2009	93.640	70.985	75,81
Pemilihan Presiden 2009	93.530	72.571	77,59
Pemilihan Kepala Daerah 2010	93.850	67.370	71,78
Pemillu Gubernur 2013	94.302	62.904	66,70
Pemilihan Legislatif 2014	94.397	75.280	79,75

Pemilihan Presiden 2014	95.418	75.585	79,21
Pemilihan Kepala Daerah 2015	90.116	67.792	75,23
Pemillu Gubernur 2018	90.546	68.910	76,10
Pemilu Serentak 2020	91.331	79.371	86,90
Pemilu Kepala Daerah 2020	94.670	73.280	77.41

Sumber : KPU Kota Magelang

3. Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan senantiasa menjadi sorotan publik. Belum optimalnya sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan merupakan titik lemah dalam implementasi tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam kaitannya kelembagaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesatuan bangsa dan politik termasuk dalam ranah urusan pemerintahan umum. Namun mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum belum diundangkan, maka berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 dan 16 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang masih menggunakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun fungsi Perlindungan Masyarakat dan fungsi Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Perubahan dan penyesuaian kelembagaan di jajaran Pemerintah Kota Magelang salah satu tujuannya adalah untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Hal ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab sebagai implementasi asas desentralisasi. Tuntutan adanya peningkatan kemampuan dan kebutuhan profesionalitas aparat yang memiliki kompetensi menjadi hal yang mutlak. Tersedianya aparat yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya aparat yang profesional diindikasikan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Di samping itu, terciptanya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tentunya akan dapat semakin meningkatkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai merupakan salah satu indikator berjalannya pelayanan OPD dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan mendesak harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Adapun review rancangan awal RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan

yang terdapat dalam Renja OPD sudah tercantum semua dalam rancangan awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				5.767.042	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				6.087.042	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.767.042	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.087.042	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Terwujudnya Pelayanan kantor, Pengelolaan Keuangan dan Barang, Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja OPD (%)</i>	100	4.104.242	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Terwujudnya Pelayanan kantor, Pengelolaan Keuangan dan Barang, Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja OPD (%)</i>	100	4.104.242	
I	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (%)</i>	100	20.400.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (%)</i>	100	20.400.	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Perencana PD yang disusun (Dokumen)	2,00	6.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Perencana PD yang disusun (Dokumen)	2,00	6.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	2.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	2.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	1.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	1.700	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	2.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	2.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	2.100	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	2.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (LKjIP, RFK, Capkin, Sakip) (Dokumen)	33	6.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (LKjIP, RFK, Capkin, Sakip) (Dokumen)	33	6.400	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Cakupan Laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan(%)	100	3.338.809	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Cakupan Laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan(%)	100	3.338.809	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya dalam 1 tahun (orang)	18,00	3.322.646	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya dalam 1 tahun (orang)	18,00	3.322.646	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun (Laporan)	12,00	13.559	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun (Laporan)	12,00	13.559	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran SKPD (Laporan)	3,00	2.604	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran SKPD (Laporan)	3,00	2.604	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Cakupan laporan administrasi umum PD (%)	100	218.053	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Cakupan laporan administrasi umum PD (%)	100	218.053	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Ruangan yang disediakan komponen listrik/penerangannya (ruang)	18	2.222	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Ruangan yang disediakan komponen listrik/penerangannya (ruang)	18	2.222	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah ASN yang disediakan makan dan minum harian (orang)	18	17.197	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah ASN yang disediakan makan dan minum harian (orang)	18	17.197	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah logistik kantor yang dibeli (isi tabung tabung Gas 12 KG) (Tabung)	6,00			(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah logistik kantor yang dibeli (isi tabung tabung Gas 12 KG) (Tabung)	6,00		
		(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah BBM Genset (liter)	483			(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah BBM Genset (liter)	483		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah barang cetakan (Jenis)	6,00	11.958	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah barang cetakan (Jenis)	6,00	11.958	
		(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jenis Barang Yang dicetak(Jenis)	6			(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jenis Barang Yang dicetak(Jenis)	6		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah dokumen yang digandakan (lembar)	22.488			(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah dokumen yang digandakan (lembar)	22.488		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah jenis Bahan bacaan (Jenis)	2	3.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah jenis Bahan bacaan (Jenis)	2	3.000	
	Penyediaan Bahan/Material	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	25.540	Penyediaan Bahan/Material	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	25.540	
		(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah alat dan Bahan pembersih (Jenis)	33,00			(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah alat dan Bahan pembersih (Jenis)	33,00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (Kegiatan)	12,00	6.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (Kegiatan)	12,00	6.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah)	Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan (Kegiatan)	54,00	151.636	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah)	Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan (Kegiatan)	54,00	151.636	
		(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jamuan rapat koordinasi yang dilaksanakan (Kegiatan)	15,00			(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jamuan rapat koordinasi yang dilaksanakan (Kegiatan)	15,00		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100.467	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100.467	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli (Unit)	11,00	100.467	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli (Unit)	11,00	100.467	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	219.212	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	219.212	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah surat yang dikelola(Buah)	800	11.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah surat yang dikelola(Buah)	800	11.000	
		(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Alat tulis kantor (Jenis)	37			(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Alat tulis kantor (Jenis)	37		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah jasa sumberdaya yang harus dibayar tiap bulan (Rekening)	4,00	44.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah jasa sumberdaya yang harus dibayar tiap bulan (Rekening)	4,00	44.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun) (orang)	7,00	163.812	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun) (orang)	7,00	163.812	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah (CPMBM) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	207.301	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah (CPMBM) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	207.301	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang diperihara (Unit)	11,00	150.485	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang diperihara (Unit)	11,00	150.485	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah STNK Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya (Unit)</i>	11			<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah STNK Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya (Unit)</i>	11		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara (Unit)</i>	3,00	37.916	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara (Unit)</i>	3,00	37.916	
		<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya (Unit)</i>	3			<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya (Unit)</i>	3		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor(Jenis)</i>	6	18.900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor(Jenis)</i>	6	18.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
II	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		<i>Persentase penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persen)</i>	68.13	238.373,00	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		<i>Persentase penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persen)</i>	68.13	238.373,00	
7	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Terlaksananya kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kegiatan)</i>	7	238.373	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Terlaksananya kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kegiatan)</i>	7	238.373	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah sosialisasi dan upacara (Kegiatan)</i>	5	145.726	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah sosialisasi dan upacara (Kegiatan)</i>	5	145.726	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>(Badan Kesbangpol kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah Fasilitas FPBI (Kegiatan)</i>	12	89.902	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>(Badan Kesbangpol kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Jumlah Fasilitas FPBI (Kegiatan)</i>	12	89.902	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	(Badan Kesbangpol Kota magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Data Strategis (Laporan)	4,00	2.745	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	(Badan Kesbangpol Kota magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Dokumen Data Strategis (Laporan)	4,00	2.745	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan pengembangan Etika Budaya Politik (Persen)	77.41	668.352,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan pengembangan Etika Budaya Politik (Persen)	77.41	668.352,00	
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan Peningkatan peran Parpol dan pengembangan Etika Budaya Politik(Kegiatan)	5	668.352	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan Peningkatan peran Parpol dan pengembangan Etika Budaya Politik(Kegiatan)	5	668.352	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Rakor Forum Diskusi Politik (Kegiatan)	1	85.753	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Rakor Forum Diskusi Politik (Kegiatan)	1	85.753	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan desiminasi, Pemeriksaan berkas dan penyerahan serta Hibah Banpol (Kegiatan)	4	582.599	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan desiminasi, Pemeriksaan berkas dan penyerahan serta Hibah Banpol (Kegiatan)	4	582.599	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang difasilitasi (Persen)	12.22	45.920,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang difasilitasi (Persen)	12.22	395.920,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
9	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah)</i>	<i>Jumlah kegiatan pengiriman Ormas (orang/Kegiatan)</i>	5	45.920.	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah)</i>	<i>Jumlah kegiatan pengiriman Ormas (orang/Kegiatan)</i>	5	395.920	
						Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama(Paket)</i>	1	350.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah)</i>	<i>Jumlah pengiriman Ormas (Kegiatan)</i>	12	45.920	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah)</i>	<i>Jumlah pengiriman Ormas (Kegiatan)</i>	12	45.920	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		<i>Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya (Persen)</i>	7.92	247.914,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		<i>Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya (Persen)</i>	7.92	217.914,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Kegiatan)	6	247.914	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Kegiatan)	6	217.914	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang terbentuk (Kampung)	1	41.869	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang terbentuk (Kampung)	1	41.869	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah operasi P4GN dan Penyuluhan (P4GN, Narkoba dan PMS) (Kegiatan)	3	94.447	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah operasi P4GN dan Penyuluhan (P4GN, Narkoba dan PMS) (Kegiatan)	3	64.447	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Fasilitas FKUB (Kegiatan)	12	110.118	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Fasilitas FKUB (Kegiatan)	12	110.118	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah)	Jumlah koordinasi dan konsultasi(Kegiatan)	1	1.480	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah)	Jumlah koordinasi dan konsultasi(Kegiatan)	1	1.480	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase peningkatan Koordinasi kewaspadaan nasional (Persen)	100	462.241,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase peningkatan Koordinasi kewaspadaan nasional (Persen)	100	462.241,00	
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	(Badan Kesbangpol Kota magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)	5	462.241	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	(Badan Kesbangpol Kota magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)	5	462.241	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan pemantauan kondusivitas daerah (Kegiatan)	365	47.618,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah kegiatan pemantauan kondusivitas daerah (Kegiatan)	365	47.618	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Fasilitas FKDM, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)	12,00	178.919	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Fasilitas FKDM, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)	12,00	178.919	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Rakor dan fasilitas Tim Stabilitas Daerah (Forkompinda) (Kegiatan)	12	235.704	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Jumlah Rakor dan fasilitas Tim Stabilitas Daerah (Forkompinda) (Kegiatan)	12	235.704	

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Salah satu acuan dalam menyusun program/kegiatan yang dicantumkan dalam Renja OPD adalah mengakomodir hasil Musrenbang. Musrenbang baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Magelang dari waktu ke waktu semakin dimaknai dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat pada setiap level Musrenbang. Namun demikian tidak semua hasil musrenbang dapat diakomodir, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maupun tingkat kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahun 2020 untuk perencanaan tahun 2021 sudah masuk dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik diakomodir seluruhnya maupun sebagian karena dilaksanakan ditingkat Kota Magelang. Disamping itu aspirasi dari masyarakat tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga telah tercantum dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pelaksanaan tupoksi setiap OPD tidak dapat dipisahkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional.

Semua urusan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dibagi habis dalam setiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Isu-isu strategis yang merupakan fenomena nyata yang wajib dicermati dan diidentifikasi dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Badan Kesbangpol merupakan OPD yang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Urusan tersebut di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bawah Kementerian Dalam Negeri dan di Tingkat Provinsi dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Di dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri menjelaskan visi yang akan dicapai adalah *“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah:

- 1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan,**

demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari keenam misi tersebut, misi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas Badan Kesbangpol adalah misi kesatu dengan tujuan yang akan diwujudkan adalah kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara. Adapun sasaran yang ditetapkan yaitu terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Disamping Renstra Kemendagri, dokumen rujukan lain adalah RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Adapun Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi untuk mewujudkannya. Keempat misi tersebut adalah:

- (1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
- (2) Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
- (3) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
- (4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Dari keempat misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara langsung dan tidak langsung mendukung semua Misi tersebut. Namun sesuai dengan tupoksinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mengambil fokus dalam membantu mewujudkan Misi ke-1 yaitu : "Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI", dengan cara mewujudkan wilayah Jawa Tengah yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI. Berdasarkan visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi OPD, yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Kondusif, Demokratis dan Partisipatif”*.

Dengan memperhatikan Renstra Kemendagri dan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah maka untuk kesinambungan dan keselarasan dengan kebijakan nasional maupun provinsi, benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan stabilitas daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

Adapun identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Badan Kesbangpoldapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Strategis
Pelayanan OPD**

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
1.	Pencegahan konflik horizontal dengan latar belakang suku, agama, ras dan antar-golongan	Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman kehidupan masyarakat	Menjaga iklim sejuk dan kondusif, aman, tertib dan damai serta harmonisasi hubungan antar pemeluk agama
2.	Pelaksanaan Pemilu yang yang mengedepankan asas demokrasi, jujur, adil dan damai	Peningkatan kesadaran politik masyarakat dan nilai-nilai demokrasi	Pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, aman dan damai
3.	Ancaman stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat	Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (kamtramtibmas) dan pencegahan tindak kriminal	Pemantauan keamanan wilayah dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
4.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam menjaga	Pengembangan kewaspadaan dini masyarakat terkait kamtramtibmas	Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
	kamtramtibmas		
5.	Penanggulangan bahaya narkoba	Pemberantasan penyalahgunaan NAPZA, miras dan penyakit masyarakat	Pencegahan penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras
6.	Penanaman kembali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang berwawasan kebangsaan	Meningkatkan dan mengembangkan wawasan kebangsaan dalam masyarakat	Pengembangan wawasan kebangsaan, termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila, dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat
7.	Pengembangan kapasitas SDM aparatur negara	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur	Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang profesional, bersih dan berwibawa

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Rancangan Awal Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kesbangpol berikut indikator kinerjanya sebagaimana tersaji dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN						SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya keamanan dan stabilitas daerah	Prosentase kriminalitas yang tertangani	80	80	80	80	80	80	Meningkatnya keamanan dan stabilitas daerah	<i>Angka kematian akibat konflik</i>	0	0	0	0	0	0
				<i>Angka Kriminalitas yang tertangani</i>	12,5	12,5	12,5	12,5		12,5	12,5					
				<i>Kasus kejahatan pembunuhan</i>	0	0	0	0		0	0					
				<i>Proporsi korban kekerasan yang melapor kepada polisi</i>	100%	100%	100%	100%		100%	100%					
				Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	<i>Prevalensi penyalahgunaan narkoba</i>	3	2,27	2,19	2,11	2,03	1,95					
					Meningkatnya masyarakat yang paham terhadap politik	<i>Tingkat Partisipasi Partai Politik masyarakat dalam pemilu</i>	0	0	0	77,99	0	0				

Berdasarkan tabel diatas maka Badan Kesbangpol Kota Magelang bersama perangkat daerah terkait berkontribusi dalam menjaga kondusivitas daerah dan berperan serta dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang religius.

C. Program dan Kegiatan

Renja Badan Kesbangpol tahun 2022 memuat program-program prioritas yang merupakan program utama yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2022 . Dalam pelaksanaannya berdasarkan urgensi dan kemampuan keuangan daerah maka program-program prioritas tersebut terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Program prioritas pertama merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau Program Unggulan Kepala Daerah, kesepakatan hasil musrenbang, hasil telaahan pokok pikiran dewan serta program intervensi yang bersifat nasional/provinsi dan hasil FGD.
2. Program prioritas kedua merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2021-2026.
3. Program prioritas ketiga merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD.

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Badan Kesbangpol Tahun 2022 sebagaimana yang tersaji dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2022 untuk OPD Badan Kesbangpol terdiri dari 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Keenam program tersebut terbagi dalam program yang ada di setiap perangkat daerah sebanyak 1 (satu) program penunjang serta program-program sesuai urusan yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah sebanyak 5 (lima) program. Total pagu indikatif / kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.046.007.000,--

dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Berikut disampaikan rincian keenam program tersebut:

1. Program yang ada di setiap perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 6 (enam) sub kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 20.400.000,--;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan, dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 3.776.434.000,--;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum dengan 7 (tujuh) sub kegiatan, dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 211.583.000,--
 - d. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 (tiga) sub kegiatan, total anggaran kegiatan sebesar Rp. 196.560.000,--
 - e. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 (tiga) sub Kegiatan, total anggaran Rp. 207.301.000,--
2. Program yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah sesuai urusannya, yaitu:
 - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tig) sub kegiatan, total anggaran 200.390.000,--
 - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik, dengan 1 (satu) Kegiatan, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, total anggaran program sebesar Rp. 635.682.000,--
 - c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan 1 (satu) kegiatan, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 175.920.000,--
 - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan 1 (satu) kegiatan terdiri

dari 4 (empat) sub Kegiatan, dengan total anggaran program Rp. 230.514.000,--

- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penangan Konflik Sosial, dengan 1 (satu) kegiatan, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan total anggaran program sebesar Rp. 391.223.000,--;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara lebih lengkap program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun berikut ini:

**TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESBANGPOL TAHUN 2022
KOTA MAGELANG**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG
TAHUN 2022**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASION AL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						6.046.007.000,00							0,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						6.046.007.000,00							0,00	
1.	8.01.8- 1.0-0.0- 0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	<i>Terwujudnya Pelayanan kantor, Pengelolaan Keuangan dan Barang, Perencanaan, Penggangan dan Capaian Kinerja OPD (%)</i>				100	4.412.278.000,00			Tidak	Tidak			4.456.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindu ngan Masyara kat
	8.01.8- 1.0-0.0- 0.01.01. 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.400.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			22.100.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (%)</i>				100		<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				100		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencana PD yang disusun (Dokumen)</i>				2,00	6.000.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				2,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)</i>				1,00	2.000.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				1,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)</i>				1,00	1.700.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)</i>				1,00	2.200.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<i>Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun (Dokumen)</i>				1,00	2.100.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (LKjIP, RFK, Capkin, Sakip) (Dokumen)</i>				33	6.400.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum <i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				33,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan (%)</i>				100	3.776.434.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum <i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>	Tidak	Tidak		100	3.766.750.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya dalam 1 tahun (orang)</i>				23,00	3.760.271.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum <i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				23,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun (Laporan)				12,00	13.559.000,00	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Semesteran SKPD (Laporan)				3,00	2.604.000,00	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	8.01.8-1.0-0.0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan laporan administrasi umum PD (%)				100	211.583.000,00	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak		100	223.250.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASION AL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Ruangan yang disediakan komponen listrik/penerangan nya (ruang)</i>				18	2.222.000,00	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				20	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah ASN yang disediakan makan dan minum harian (orang)</i> <i>Jumlah logistik kantor yang dibeli (isi tabung tabung Gas 12 KG) (Tabung)</i> <i>Jumlah BBM Genset (liter)</i>				18 6,00 483	17.197.000,00	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG) (Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG) (Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				20 12,00 500	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah barang cetakan (Jenis)</i>				6,00	11.958.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum <i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				6,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	<i>Jenis bahan bacaan (jenis)</i>				2,00	3.000.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum <i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				2,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at
		Penyediaan Bahan/Material	<i>Gedung kantor yang dipelihara (Unit)</i>				1	25.540.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum <i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				1	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah alat dan Bahan pembersih (Jenis)				33,00		(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)					30,00		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (Kegiatan)				12,00	6.480.000,00	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan (Kegiatan) Jamuan rapat koordinasi yang dilaksanakan (Kegiatan)				54,00 15,00	145.186.000,00	(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah) (Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				54,00 15,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.8- 1.0-0.0- 0.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>				100	196.560.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak		100	234.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah surat yang dikelola (Buah)</i> <i>Jumlah Alat tulis kantor (Jenis)</i>				800	11.000.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i> <i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						44.400.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah jasa sumberdaya yang harus dibayar tiap bulan (Rekening)</i>				4,00		<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				4,00		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjanganannya (dalam 1 tahun) (orang)</i>				7,00	141.160.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				7,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah (CPMBM) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>				100	207.301.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>	Tidak	Tidak		100	210.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang diperihara (Unit) Jumlah STNK Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya (Unit)</i>				11,00 11	150.485.000,00	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG) (Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				11,00 11	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara (Unit)</i>				3,00	37.916.000,00	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/ KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya (Unit)</i>				3		<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>					3		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)</i>				8	18.900.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				10	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.	8.01.8- 1.0-0.0- 0.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Tingkat Pemahaman Karakter Kebangsaan (Persen)</i>				17.3	200.390.000,00			Tidak	Tidak			250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	8.01.8- 1.0-0.0- 0.01.02. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						200.390.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Terlaksananya kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kegiatan)</i>				7		<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				7		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah sosialisasi dan upacara (Kegiatan)</i>				5,00	107.743.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				5,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Fasilitas FPBI (Kegiatan)</i>				12	89.902.000,00	<i>(Badan Kesbangpol kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				12	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Data Strategis (Laporan)				4,00	2.745.000,00	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				4,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3.	8.01.8-1.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman politik (%)				77.46	635.682.000,00			Tidak	Tidak			770.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.8- 1.0-0.0- 0.01.03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Jumlah kegiatan Peningkatan peran Parpol dan pengembangan Etika Budaya Politik (Kegiatan)</i>				5	635.682.000,00	(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak		5	770.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarakat
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu / Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						53.083.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM/ KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rakor Forum Diskusi Politik (Kegiatan)</i>				1,00		<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				1,00		
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah kegiatan desiminasi, Pemeriksaan berkas dan penyerahan serta Hibah Banpol (Kegiatan)</i>				4	582.599.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				4	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
4.	8.01.8- 1.0-0.0- 0.01.04	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAK ATAN	Tingkat pemberdayaan ormas (persen)				12.22	175.920.000,00			Tidak	Tidak			450.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pengiriman Ormas (orang/Kegiatan)					175.920.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			450.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Hibah Ormas (Paket)				5		(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5		
							3		(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1		
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah ormas (Paket)					130.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
							3		(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,00		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pengiriman Ormas (Kegiatan)				12	45.920.000,00	(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
5.	8.01.8-1.0-0.0-0.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tingkat pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat (Persen)				7.92	230.514.000,00			Tidak	Tidak			240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial & Budaya						230.514.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Kegiatan)</i>				6		<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				6		
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang terbentuk (Kampung)</i>				1	41.869.000,00	<i>(Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				1	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						77.047.000,00		<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>					-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah operasi P4GN dan Penyuluhan (P4GN, Narkoba dan PMS) (Kegiatan)</i>				3,00		<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				3,00		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Fasilitas FKUB (Kegiatan)</i>				12	110.118.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				12	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						1.480.000,00		<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>					-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)</i>				1		<i>(Luar Kota Magelang, Luar Wilayah)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				4		
6.	8.01.8-1.0-0.0-0.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Kualitas pencegahan dan penanganan konflik sosial (Persen)</i>				100	391.223.000,00			Tidak	Tidak			500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)</i>				5	391.223.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i> <i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>	Tidak	Tidak		5	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah kegiatan pemantauan kondusivitas daerah (Kegiatan)</i>				365,00	25.718.000,00	<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				365,00	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						178.919.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fasilitas FKDM, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial (Kegiatan)</i>				12,00		<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				12,00		
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						186.586.000,00		<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>					-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun gan Masyarak at
			<i>Jumlah Rakor dan fasilitasi Tim Stabilitas Daerah (Forkompinda) (Kegiatan)</i>				12,00		<i>(Badan Kesbangpol Kota Magelang, KOTA MAGELANG)</i>	<i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i>				12,00		
J U M L A H															6.666.600.000,00	
								6.046.007.000,00						6.666.600.000,00		

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah dimaksud adalah agar tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan melalui rumusan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan tahun 2022, dengan usulan pagu setiap kegiatan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam Renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang muncul dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra Perangkat Daerah, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

Dengan disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya, yang akan dilaksanakan ditahun berjalan maupun yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Mengingat dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 disusun dengan mengakomodir usulan masyarakat dalam musrenbang dan forum OPD yang selaras dengan program prioritas dalam RKPD Tahun 2022.
2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakan.
3. Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dalam lingkup perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan RKA Tahun 2022 dengan berpedoman pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA MAGELANG



HAMZAH KHOLIFI